

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pertumbuhan penduduk yang cepat terjadi akibat tingginya angka pertumbuhan penduduk. Laju pertumbuhan yang pesat akan menjadi masalah bagi pembangunan Indonesia diantaranya yaitu apabila pertumbuhan penduduk tidak disertai dengan lapangan kerja yang cukup maka menimbulkan masalah kriminalitas, layanan kesehatan yang tidak memadai dan rendahnya kualitas pendidikan, semakin banyaknya polusi dan limbah rumah tangga dll. Badan perserikatan Bangsa - Bangsa (PBB) mengemukakan bahwa total penduduk dunia pada tahun 2018 mencapai 7,2 milyar dan akan mencapai 9,2 milyar pada tahun 2050.

Program Keluarga Berencana (KB) merupakan salah satu metode untuk menekan laju pertumbuhan penduduk, namun persentase pemakai kontrasepsi tidak banyak mengalami perubahan yaitu 60% pada tahun 2002 menjadi 61% pada tahun 2012 (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, 2012).

Program Keluarga Berencana (KB) memiliki sasaran program yaitu Menurunkan rata-rata laju pertumbuhan penduduk secara nasional, menurunkan angka kelahiran, dan meningkatkan penggunaan metode kontrasepsi yang efektif dan efisien (Lucky dan Titik, 2019). Pelaksanaan program Keluarga Berencana (KB) untuk menjarangkan atau merencanakan jumlah dan jarak kehamilan dengan memakai kontrasepsi. Pelayanan kontrasepsi merupakan salah satu jenis pelayanan kb yang tersedia selain komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE), konseling, pelayanan infertilitas, pendidikan seks, konsultasi genetik, tes keganasan, serta adopsi (BKKBN, 2015).

Menurut UU NO.52 Tahun 2009 tentang Keluarga Berencana (KB) adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan dan bantuan sesuai hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas. Alat kontrasepsi adalah usaha untuk mencegah terjadinya kehamilan yang bersifat jangka panjang dan dapat jangka pendek. Alat kontrasepsi yang termasuk dalam kelompok MKJP adalah Intra Uterine Device (IUD), Implant (susuk), MOP (Metode Operasi Pria), dan MOW (Metode Operasi Wanita) sedangkan yang

termasuk dalam kategori Non-MKJP adalah suntik, pil, dan kondom. Kebijakan pemerintah tentang KB saat ini mengarah pada pemakaian Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) (Balitbangkes, 2013).

KB dalam kesehatan reproduksi berperan untuk menunjang tercapainya kesehatan ibu dan bayi, karena kehamilan yang diinginkan dan berlangsung dalam keadaan dan saat yang tepat akan lebih menjamin keselamatan ibu dan bayi yang dikandungnya. Selain itu juga berperan dalam menurunkan risiko kematian ibu melalui pencegahan kehamilan, menunda kehamilan melalui pendewasaan usia hamil, menjarangkan kehamilan atau membatasi kehamilan bila anak sudah dianggap cukup (Pinem, 2009)

AKDR adalah metode kontrasepsi yang paling efektif untuk menjarangkan kehamilan karena tingkat kegagalan kontrasepsi AKDR ini sangat kecil yaitu kurang lebih 1% sehingga pengaruhnya cukup besar bagi kesehatan reproduksi wanita dan AKDR mempunyai masa kerja yang panjang, berbeda dengan kontrasepsi hormonal yang dapat berpengaruh pada tubuh dan dapat menimbulkan efek samping secara sistemik (Hartanto (2016). Meskipun AKDR merupakan alat kontrasepsi yang sangat penting bagi kesehatan reproduksi ibu serta dapat mengendalikan lajunya pertumbuhan penduduk namun penggunaan AKDR ini menurun dibandingkan dengan alat kontrasepsi hormonal yang tinggi yang menimbulkan resiko bila penggunaannya dalam waktu panjang. Selain berisiko, biaya kontrasepsi hormonal lebih mahal dibandingkan kontrasepsi non hormonal.

Berdasarkan data Profil Kesehatan Indonesia tahun 2018, jumlah akseptor KB di Indonesia di tahun 2018 dari 38.343.931 Pasangan Usia Subur (PUS) sebanyak 24.258.532 (63,27%) menjadi akseptor KB aktif. Rendahnya pemakaian MKJP di Indonesia disebabkan oleh banyak faktor, diantaranya faktor individu (karakteristik sosiodemografi), faktor lingkungan (keluarga, masyarakat, petugas) dan faktor program yang berkaitan dengan kualitas pelayanan (Asih, 2009; Crell LC, 2012).

Berdasarkan hasil penelitian dari Elizawarda tentang Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Pemilihan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang Pada Ibu. Akseptor KB disimpulkan bahwa responden umumnya berusia > 30 tahun sebanyak 63 orang, memiliki pengetahuan kurang sebesar 41 orang (43,6%), dan dukungan suami dalam penggunaan alat kontrasepsi pada umumnya lemah (58,5%) (Elizawarda, 2017).

Berhubungan Dengan Pemilihan Alat Kontrasepsi Pada Wanita Usia Subur Di Wilayah Kerja Puskesmas disimpulkan bahwa adanya hubungan pengetahuan dan dukungan suami

dengan pemilihan metode kontrasepsi hormonal, serta tidak ada hubungan peran PLKB dengan pemilihan metode kontrasepsi hormonal (Bakri, Z, dkk., 2019).

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti ingin melakukan penelitian tentang “Faktor-Faktor yang Memengaruhi Keengganan Akseptor KB untuk Menggunakan Alat Kontrasepsi dalam Rahim (AKDR).

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan literatur hasil dari profil kesehatan tahun 2018 dan 2019 bahwa jumlah akseptor implant relatif rendah. Maka uraian diatas rumusan masalah penelitian ini adalah : Faktor-faktor apa yang mempengaruhi keengganan akseptor KB untuk menggunakan alat kontrasepsi dalam Rahim (AKDR) berdasarkan literature review

1.3. Tujuan Literature Review

Untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keengganan akseptor untuk menggunakan alat kontrasepsi AKDR berdasarkan literature review

1.4. Manfaat Literature Review

A. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, *Literature Review* ini diharapkan agar dapat meningkatkan pemahaman tentang konsep atau teori mengenai metode faktor-faktor yang mempengaruhi keengganan akseptor untuk menggunakan alat kontrasepsi AKDR.

B. Manfaat Praktis

Manfaat praktis ini sebagai bahan informasi tentang ”faktor-faktor yang mempengaruhi keengganan akseptor untuk menggunakan alat kontrasepsi AKDR, Serta Meningkatkan kualitas pemberian kontrasepsi AKDR.